OMBUDSMAN NTT IMBAU INI SAAT PENERIMAAN MURID BARU SMA/SMK

Senin, 23 Juni 2025 - ntt

KUPANG- Tahap pendaftaran dan verifikasi penerimaan murid baru SMA, SMK dan madrasah se-NTT dimulai hingga tanggal 21 Juni. Sebanyak 895 sekolah akan melaksanakan pendaftaran penerimaan murid baru secara *offline* dengan pertimbangan kemampuan infrastruktur digital serta kondisi geografis di daerah masing-masing dan sebanyak 62 sekolah lainnya melaksanakan pendaftaran penerimaan murid baru secara online. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton saat menyampaikan keterangan di ruang kerjanya, Kamis (19/6/2025).

"Seluruh masyarakat NTT diminta untuk memantau jalannya proses pendaftaran, verifikasi, pengumuman hingga daftar ulang agar berjalan sesuai petunjuk teknis dinas pendidikan dan jika menemukan indikasi pelanggaran agar dapat disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT via nomor 081353419770 atau 082140019751 atau 082340140517," tegas Darius.

"Jika keluhan anda tidak ditindaklanjuti, silahkan melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT via nomor call center 0811-1453-737," lanjutnya.

Sementera itu, pendaftaran online dilakukan melalui situs resmi https://ntt.spmb.id. Diketahui, pendaftaran dilakukan melalui lima jalur yaitu, pertama, jalur domisili untuk SMA berdasarkan alamat pada kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Kedua, jalur afirmasi. Jalur ini khusus bagi keluarga tidak mampu dengan bukti kartu PKH, KPS, KKS, KIP atau surat keterangan penyandang disabilitas. Ketiga, jalur mutasi. Jalur ini khusus bagi anak yang mengikuti perpindahan orang dibuktikan dengan surat keterangan pindah orang tua. Keempat, jalur prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik. Kelima, jalur umum untuk SMK berdasarkan minat dan kompetensi yang diinginkan.

Untuk menjamin integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun pelajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan Provinsi NTT telah bekerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Inspektorat Provinsi dan Balai Penjaminan Mutu Provinsi (BPMP) untuk melakukan pengawasan bersama.